

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 2 /PB/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI
MENGUNAKAN DATABASE GAJI TERPUSAT

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dalam pembayaran gaji pegawai yang akuntabel perlu didukung dengan penggunaan *database* gaji yang terintegrasi;
- b. bahwa dalam rangka penggunaan *database* gaji terintegrasi untuk pembayaran gaji pegawai sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun peraturan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dengan menggunakan *database* gaji terpusat;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan *Database* Gaji Terpusat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepada Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI MENGGUNAKAN DATABASE GAJI TERPUSAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi BUN.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
10. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk *softcopy* yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
11. Aplikasi Gaji KPPN adalah aplikasi gaji berbasis web yang menggunakan basis data tunggal (*single database*) untuk digunakan KPPN dalam proses pengujian.

9

BAB V
MEKANISME PEMBAYARAN GAJI

Pasal 5

- (1) Berdasarkan ADK Gaji yang disampaikan oleh Satker:
 - a. Petugas KPPN melakukan *upload* ADK Gaji ke dalam Aplikasi Gaji KPPN.
 - b. Dalam hal Satker menyampaikan ADK Gaji secara elektronik, *upload* ADK Gaji ke dalam Aplikasi Gaji KPPN sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh sistem secara otomatis.
- (2) ADK Gaji yang telah di-*upload* ke dalam Aplikasi Gaji KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian oleh sistem, antara lain meliputi:
 - a. validasi dan pengujian gaji dengan gaji bulan sebelumnya; dan
 - b. pengujian NIP/NRP ganda untuk mencegah pembayaran ganda.
- (3) Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai, KPPN segera:
 - a. melakukan *approval* melalui Aplikasi Gaji KPPN.
 - b. me-*restore* ADK Gaji ke dalam *database* gaji terpusat melalui Aplikasi Gaji KPPN.
- (4) Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai, KPPN tidak melakukan *approval* melalui Aplikasi Gaji KPPN dan menginformasikan penolakan ADK Gaji kepada Satker untuk dilakukan perbaikan.
- (5) Apabila dalam ketidaksesuaian hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat NIP/NRP ganda:
 - a. pada informasi penolakan ADK Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai:
 1. daftar nama PNS/anggota Polri/prajurit TNI yang mempunyai NIP/NRP ganda;
 2. permintaan kepada Satker untuk:
 - a) mereviu dan/atau memperbaiki data NIP/NRP pegawai yang bersangkutan sesuai keputusan kepegawaian (SK PNS/calon PNS, pengangkatan anggota Polri/prajurit TNI, atau kenaikan pangkat terakhir);
 - b) mengajukan perbaikan ADK Gaji dan perubahan data *supplier*, apabila terdapat perbaikan NIP/NRP; dan
 - c) menyampaikan ADK Gaji yang telah diperbaiki kepada KPPN dengan disertai surat pernyataan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dan dilampiri fotokopi keputusan kepegawaian.
 - b. berdasarkan surat pernyataan dan fotokopi keputusan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 butir c), KPPN dapat melakukan *approval* pada Aplikasi Gaji KPPN untuk melanjutkan proses pembayaran gaji pegawai yang mempunyai NIP/NRP ganda.

Q

Pasal 6

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPM, serta penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI

PENERBITAN

SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)

Pasal 7

- (1) KPA menerbitkan dan menandatangani SKPP dalam hal terdapat PNS/calon PNS, anggota Polri, atau prajurit TNI yang berdasarkan keputusan/surat perintah pejabat yang berwenang:
 - a. dipindahtugaskan ke Satker lainnya; atau
 - b. diberhentikan sebagai PNS/calon PNS, anggota Polri, atau prajurit TNI dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun
- (2) Dalam penerbitan SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker mencantumkan kode Satker asal dan/atau kode Satker tujuan sesuai dengan format sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Tata cara penerbitan dan pengesahan SKPP dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Untuk memastikan pelaksanaan pembayaran gaji dengan menggunakan *database* gaji terpusat berjalan dengan baik, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran gaji menggunakan *database* gaji terpusat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka validitas data, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat melakukan rekonsiliasi dan konfirmasi data pegawai yang mempunyai NIP/NRP ganda kepada instansi yang menerbitkan keputusan kepegawaian.
- (2) Dalam hal terdapat keterlanjuran/kelebihan pembayaran gaji, mekanisme penyelesaian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Marwanto Harjowiryo
MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 2
/PB/2018 PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI
MENGUNAKAN DATABASE GAJI TERPUSAT

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Sehubungan dengan pengajuan SPM LS Gaji Induk/ Susulan/ Kekurangan*) bulan, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data PNS/Anggota Polri/Prajurit TNI* telah sesuai dengan Surat Keputusan Kepegawaian sebagaimana dalam daftar terlampir.

Dalam hal data PNS/Anggota Polri/Prajurit TNI*) tersebut tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, kami bertanggung jawab dan bersedia untuk menyetor ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....
Kuasa Pengguna Anggaran.....

Materai
Rp 6.000,-

.....
NIP/NRP.....

*) . Pilih salah satu

Q

Lampiran Surat Pernyataan KPA Satker
 Nomor:
 Tanggal:

DATA PEGAWAI YANG NIP/NRP-NYA GANDA

NO	NAMA PNS/ANGGOTA POLRI/PRAJURIT TNI	NIP/NRP		SESUAI/TIDAK SESUAI	DOKUMEN KEPEGAWAIAN *) NOMOR SURAT KEPUTUSAN TANGGAL
		SEMULA	MENJADI		
1					
2					
3					
4					
5					
	Dst...				

**) Fotokopi surat keputusan kepegawaian harus dilampirkan*

Kuasa Pengguna Anggaran

.....
 NIP/NRP



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Marwanto Harjowiryo

MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 2
/PB/2018 PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI
MENGUNAKAN DATABASE GAJI TERPUSAT

FORMAT SKPP

1. FORMAT SKPP PINDAH PNS
2. FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF PNS/CALON PNS
3. FORMAT LAMPIRAN SKPP PINDAH KOLEKTIF PNS/CALON PNS
4. FORMAT SKPP PENSIUN PNS
5. FORMAT SKPP PINDAH ANGGOTA POLRI
6. FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF ANGGOTA POLRI
7. FORMAT LAMPIRAN SKPP PINDAH KOLEKTIF ANGGOTA POLRI
8. FORMAT SKPP PENSIUN ANGGOTA POLRI
9. FORMAT SKPP PINDAH PRAJURIT TNI
10. FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF PRAJURIT TNI
11. FORMAT LAMPIRAN SKPP PINDAH KOLEKTIF PRAJURIT TNI
12. FORMAT SKPP PENSIUN PRAJURIT TNI

1. FORMAT SKPP PINDAH PNS

(Nama Satker)	SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (PINDAH)		Nomor :
			Lampiran :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala menerangkan bahwa:			
IDENTITAS PEGAWAI			
Nama Pegawai	:		
NIP	:		
Tempat Lahir	:		
Tanggal Lahir	:		
Golongan / Pangkat	:		
Jabatan	:		
Satker dan Kode Satker	:		
BERDASAR SURAT KEPUTUSAN			
SK Dari	:		
Tanggal SK	:		
Nomor SK	:		
Dipindahkan sebagai			
Jabatan	:		
Satker dan Kode Satker	:		
SAMPAI DENGAN BULAN TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :			
PENGHASILAN		POTONGAN	
Gaji Pokok		Iuran Wajib Pegawai	
Tunjangan Istri / Suami		Potongan Beras	
Tunjangan Anak		PPh Pasal 21	
Tunjangan Umum		Sewa Rumah Dinas	
Tunjangan Beras		Utang Kepada Negara	
Tunjangan Khusus Papua		TGR	
Tunjangan Struktural		Potongan Lain	
Tunjangan Fungsional			
Tunjangan Lainnya			
Pembulatan		JUMLAH POTONGAN	
Tunjangan Pajak		JUMLAH BERSIH	
JUMLAH KOTOR			
PEMBAYARAN LAINNYA			
Uang Makan Terakhir			
Gaji 13 Terakhir Tahun			
Dibayarkan Uang Muka Gaji Rp			
Nomor SP2D			
Tanggal SP2D			

9

UTANG – UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan	Akun Penerimaan

ANGGOTA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN SENDIRI DAN MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA DARI PEGAWAI TERSEBUT			
Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir	Tertanggung

DISAMPAIKAN KEPADA	, 20.....
1. KPA (Satker Baru) 2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal 3. KPPN sebagai pertinggal	Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Nama NIP/NRP Data pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari database KPPN Kepala Seksi PD/PDMS KPPN Nama NIP

9

2. FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF PNS

(Nama Satker)	SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN KOLEKTIF (PINDAH)		Nomor :
			Lampiran :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala menerangkan bahwa:			
IDENTITAS PEGAWAI			
Nama Pegawai	:	, dkk (... orang)	
NRP	:	Terlampir	
Tempat Lahir	:	Terlampir	
Tanggal Lahir	:	Terlampir	
Golongan / Pangkat	:	Terlampir	
Jabatan	:	Terlampir	
Satker dan Kode Satker	:		
BERDASAR SURAT KEPUTUSAN			
SK Dari	:		
Tanggal SK	:		
Nomor SK	:		
Dipindahkan ke			
Satker dan Kode Satker	:		
SAMPAI DENGAN BULAN TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :			
PENGHASILAN		POTONGAN	
Terlampir		Terlampir	
PEMBAYARAN LAINNYA			
Gaji 13 Terakhir Tahun			
Dibayarkan Uang Muka Gaji Rp			
Nomor SP2D			
Tanggal SP2D			
DISAMPAIKAN KEPADA		 20.....	
1. KPA (Satker Baru)		Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala...	
2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal			
3. KPPN sebagai pertinggal			
		Nama NIP/NRP	
		Data pegawai sebagaimana terlampir telah dinonaktifkan dari database KPPN. Kepala Seksi PD/PDMS KPPN.....	
		Nama NIP	

4

3. FORMAT LAMPIRAN PINDAH KOLEKTIF PNS

DAFTAR Gaji PEGAWAI																	
PEMBAYARAN														LEMBAR KE:		KETERANGAN	
NO URUT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI GOLONGAN	STS KAWIN JML ANAK/ JIWA	PENGHASILAN					POTONGAN					JUMLAH BERSIH YANG DIBAYARKAN	KETERANGAN PEMBAYARAN UANG MUKA GAJI SISA HUTANG, DLL			
			GAJI POKOK TUNJ KELUARGA A. ISTRI/SUAMI B. ANAK	TUN. UMUM TUN. K. PAPA/TA TW. TERPENCIL	T. STRUKTURAL T. FUNGSIONAL T. DIPERSAMAKAN PEMBULATAN	TUNJANGAN PANGAN/BERAS	TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN KOTOR	POTONGAN BERAS	IURAN WAJIB PEGAWAI	PAJAK PENGHASILAN	SEWA RUMAH UTANG POT. LAIN			JUMLAH POTONGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

KUALA PENGUNA ANGGARAN

NRP/NIP

LEMBAR INI MEMUAT : ... PEGAWAI * ... ISTRI/SUAMI * ... ANAK * ... JIWA

4. FORMAT SKPP PENSIUN PNS

(Nama Satker)	SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (PENSIUN)	Nomor :	
		Lampiran :	
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala menerangkan bahwa:			
IDENTITAS PEGAWAI			
Nama Pegawai	:		
NIP	:		
Tempat Lahir	:		
Tanggal Lahir	:		
Golongan / Pangkat	:		
Jabatan	:		
Satker dan Kode Satker	:		
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN			
SK Dari	:		
Tanggal SK	:		
Nomor SK	:		
Diberhentikan sebagai PNS	:		
Terhitung Mulai Tanggal	:		
SAMPAI DENGAN BULAN TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :			
PENGHASILAN		POTONGAN	
Gaji Pokok		Iuran Wajib Pegawai	
Tunjangan Istri / Suami		Potongan Beras	
Tunjangan Anak		PPh Pasal 21	
Tunjangan Umum		Sewa Rumah Dinas	
Tunjangan Beras		Utang Kepada Negara	
Tunjangan Khusus Papua		TGR	
Tunjangan Struktural		Potongan Lainnya	
Tunjangan Fungsional			
Tunjangan Lainnya			
Pembulatan		JUMLAH POTONGAN	
Tunjangan PPh Pasal 21		JUMLAH BERSIH	
JUMLAH KOTOR			
PEMBAYARAN LAINNYA			
Uang Makan Terakhir			
Gaji 13 Terakhir Tahun			

UTANG – UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan	Akun Penerimaan

ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN DALAM DAFTAR GAJI		
Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir

DISAMPAIKAN KEPADA 1. PT Taspen (Persero)/ PT. ASABRI (Persero) Cabang 2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal 3. KPPN sebagai pertinggal	Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Nama NIP/NRP Data pegawai telah dinonaktifkan dari database KPPN Kepala Seksi PD/PDMS KPPN Nama NIP

5. FORMAT SKPP PINDAH ANGGOTA POLRI

(Nama Satker)	SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (PINDAH)		Nomor :	
			Lampiran :	
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala menerangkan bahwa:				
IDENTITAS PEGAWAI				
Nama Pegawai	:			
NRP	:			
Tempat Lahir	:			
Tanggal Lahir	:			
Golongan / Pangkat	:			
Jabatan	:			
Satker dan Kode Satker	:			
BERDASAR SURAT KEPUTUSAN				
SK Dari	:			
Tanggal SK	:			
Nomor SK	:			
Dipindahkan sebagai	:			
Jabatan	:			
Satker dan Kode Satker	:			
SAMPAI DENGAN BULAN TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :				
PENGHASILAN		POTONGAN		
Gaji Pokok		Potongan Beras		
Tunjangan Istri / Suami		Iuran Wajib Pegawai		
Tunjangan Anak		PPh Pasal 21		
Tunjangan Umum		Sewa Rumah Dinas		
Tunjangan Beras		Utang Kepada Negara		
Tunjangan Struk/Fung.		TGR		
Tunjangan Polwan		Potongan Lain		
Tunjangan Lauk Pauk				
Tunjangan Lainnya		JUMLAH POTONGAN		
Pembulatan		JUMLAH BERSIH		
Tunjangan Pajak Penghasilan				
JUMLAH KOTOR				
PEMBAYARAN LAINNYA				
Gaji 13 Terakhir Tahun				
Dibayarkan Uang Muka Gaji Rp				
Nomor SP2D				
Tanggal SP2D				

9

UTANG - UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan	Akun Penerimaan

ANGGOTA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN SENDIRI DAN MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA DARI PEGAWAI TERSEBUT			
Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir	Tertanggung

DISAMPAIKAN KEPADA 1. KPA (Satker Baru) 2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal 3. KPPN sebagai pertinggal	 20..... Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Nama NRP/NIP Data pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari database KPPN Kepala Seksi PD/PDMS KPPN Nama NIP
--	---

9

6. FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF ANGGOTA POLRI

(Nama Satker)	SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN KOLEKTIF (PINDAH)	Nomor :
		Lampiran :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala menerangkan bahwa:		
IDENTITAS PEGAWAI		
Nama Pegawai	:	, dkk (..... orang)
NRP	:	Terlampir
Tempat Lahir	:	Terlampir
Tanggal Lahir	:	Terlampir
Golongan / Pangkat	:	Terlampir
Jabatan	:	Terlampir
Satker dan Kode Satker	:	
BERDASAR SURAT KEPUTUSAN		
SK Dari	:	
Tanggal SK	:	
Nomor SK	:	
Dipindahkan sebagai		
Jabatan	:	
Satker dan Kode Satker	:	
SAMPAI DENGAN BULAN TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :		
PENGHASILAN	POTONGAN	
Terlampir	Terlampir	
PEMBAYARAN LAINNYA		
Gaji 13 Terakhir Tahun		
Dibayarkan Uang Muka Gaji		
Rp		
Nomor SP2D		
Tanggal SP2D		
DISAMPAIKAN KEPADA		
1. KPA (Satker Baru)		
2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal		
3. KPPN sebagai pertinggal		
..... 20.....		
Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala		
Nama		
NRP/NIP		
Data pegawai sebagaimana terlampir telah dinonaktifkan dari database KPPN.		
Kepala Seksi PD/PDMS KPPN.....		
Nama		
NIP		

4

7. FORMAT LAMPIRAN SKPP PINDAH KOLEKTIF ANGGOTA POLRI

DAFTAR GAJI PEGAWAI														
PEMBAYARAN										LEMBAR KE :				
NO. URUT	NAMA PANGKAT NRP JABATAN NPWP	JAB/ESLN STS KAWIN JML JIWA KDGAPOK	PENGHASILAN						POTONGAN			JUMLAH BERSIH YANG DIBAYARKAN	KETERANGAN PEMBAYARAN UANGMUKA GAJI SISA HUTANG, DLL	
			GAJI POKOK T. ISTRI/SUAMI T. ANAK G BRUTO	T. LAUK PAUK T. UMUM T. BREVET T. SANDI	T. PGN/BERAS T. STRUKTURAL T. FUNGSIONAL T. PAPUA	T. POLWAN T. POLMAS T. PENCIL T. TERAMPIL	T. P. TERLUAR TPP T. PJK PENGHASILAN PEMBULATAN	JUMLAH PENGHASILAN KOTOR	P. BERAS IWP PPh Ps. 21	SEWA RUMAH UTANG	PENGEMBALIAN TGR POT. LAINNYA			JUMLAH POTONGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			-----+											
			-----+											
			-----+											
			-----+											
			-----+											

.....
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

.....
NRP/NIP

LEMBAR INI MEMUAT : ... PEGAWAI + ... ISTRI/SUAMI + ... ANAK = ... JIWA

8. FORMAT SKPP PENSIUN ANGGOTA POLRI

(Nama Satker)	SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (PENSIUN)		Nomor :	
			Lampiran :	
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala menerangkan bahwa:				
IDENTITAS PEGAWAI				
Nama Pegawai	:			
NRP	:			
Tempat Lahir	:			
Tanggal Lahir	:			
Golongan / Pangkat	:			
Jabatan	:			
Satker dan Kode Satker	:			
BERDASAR SURAT KEPUTUSAN				
SK Dari	:			
Tanggal SK	:			
Nomor SK	:			
Diberhentikan sebagai Anggota Polri Terhitung Mulai Tanggal				
SAMPAI DENGAN BULAN TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :				
PENGHASILAN		POTONGAN		
Gaji Pokok		Potongan Beras		
Tunjangan Istri / Suami		Iuran Wajib Pegawai		
Tunjangan Anak		PPH Pasal 21		
Tunjangan Umum		Sewa Rumah Dinas		
Tunjangan Beras		Utang Kepada Negara		
Tunjangan Struk/Fung.		TGR		
Tunjangan Polwan		Potongan Lain		
Tunjangan Lauk Pauk				
Tunjangan Lainnya		JUMLAH POTONGAN		
Pembulatan		JUMLAH BERSIH		
Tunjangan Pajak Penghasilan				
JUMLAH KOTOR				
PEMBAYARAN LAINNYA				
Gaji 13 Terakhir Tahun				
Dibayarkan Uang Muka Gaji Rp				
Nomor SP2D				
Tanggal SP2D				

9

UTANG - UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan	Akun Penerimaan

ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN DALAM DAFTAR GAJI		
Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir

DISAMPAIKAN KEPADA 1. PT. ASABRI (Persero) Cabang 2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal 3. KPPN sebagai pertinggal	Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Nama NRP/NIP Data pegawai telah dinonaktifkan dari database KPPN Kepala Seksi PD/PDMS KPPN Nama NIP
--	--

4

9. FORMAT SKPP PINDAH PRAJURIT TNI

(Nama Satker)	SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (PINDAH)		Nomor :
			Lampiran :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala menerangkan bahwa:			
IDENTITAS PEGAWAI			
Nama Pegawai	:		
NRP	:		
Tempat Lahir	:		
Tanggal Lahir	:		
Golongan / Pangkat	:		
Jabatan	:		
Satker dan Kode Satker	:		
BERDASAR SURAT KEPUTUSAN			
SK Dari	:		
Tanggal SK	:		
Nomor SK	:		
Dipindahkan sebagai	:		
Jabatan	:		
Satker dan Kode Satker	:		
SAMPAI DENGAN BULAN TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :			
PENGHASILAN		POTONGAN	
Gaji Pokok		Potongan Beras	
Tunjangan Istri / Suami		Iuran Wajib Pegawai	
Tunjangan Anak		PPh Pasal 21	
Tunjangan Umum		Sewa Rumah Dinas	
Tunjangan Beras		Utang Kepada Negara	
Tunjangan Struk/Fung.		TGR	
Tunjangan Kowan		Potongan Lain	
Tunjangan Babinsa			
Tunjangan Lauk Pauk			
Tunjangan Papua			
Tunjangan Pencil			
Tunjangan P. Terluar			
Tunjangan Terampil			
Tunjangan Lainnya		JUMLAH POTONGAN	
Pembulatan		JUMLAH BERSIH	
Tunjangan Pajak Penghasilan			
JUMLAH KOTOR			
PEMBAYARAN LAINNYA			
Gaji 13 Terakhir Tahun			
Dibayarkan Uang Muka Gaji Rp Nomor SP2D Tanggal SP2D			

UTANG - UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan	Akun Penerimaan

ANGGOTA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN SENDIRI DAN MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA DARI PEGAWAI TERSEBUT			
Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir	Tertanggung

DISAMPAIKAN KEPADA 1. KPA (Satker Baru) 2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal 3. KPPN sebagai pertinggal	 20..... Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Nama NRP/NIP Data pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari database KPPN Kepala Seksi PD/PDMS KPPN Nama NIP
---	---

9

10. FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF PRAJURIT TNI

(Nama Satker)	SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN KOLEKTIF (PINDAH)		Nomor :
			Lampiran :
Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala menerangkan bahwa:			
IDENTITAS PEGAWAI			
Nama Pegawai	:	, dkk (.... orang)	
NRP	:	Terlampir	
Tempat Lahir	:	Terlampir	
Tanggal Lahir	:	Terlampir	
Golongan / Pangkat	:	Terlampir	
Jabatan	:	Terlampir	
Satker dan Kode Satker	:		
BERDASAR SURAT KEPUTUSAN			
SK Dari	:		
Tanggal SK	:		
Nomor SK	:		
Dipindahkan ke			
Satker dan Kode Satker	:		
SAMPAI DENGAN BULAN TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :			
PENGHASILAN		POTONGAN	
Terlampir		Terlampir	
PEMBAYARAN LAINNYA			
Gaji 13 Terakhir Tahun			
Dibayarkan Uang Muka Gaji Rp			
Nomor SP2D			
Tanggal SP2D			
DISAMPAIKAN KEPADA 1. KPA (Satker Baru) 2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal 3. KPPN sebagai pertinggal		 20..... Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Nama NRP/NIP Data pegawai sebagaimana terlampir telah dinonaktifkan dari database KPPN. Kepala Seksi PD/PDMS KPPN..... Nama NIP	

04

11. FORMAT LAMPIRAN SKPP PINDAH KOLEKTIF PRAJURIT TNI

KEMENTERIAN PERTAHANAN KU KOTAMA PAKU/NA JURU BAYAR KESATUAN/SATKER DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI PEMBAYARAN : GAJI Lampiran SKPP Kolektif Nomor: Tanggal: BENTUK POK DPP STATUS HALAMAN															
NO. URUT	NAMA NRP TGL LAHIR - TMT JAD PANGKAT - JABATAN NPWP	JAWA/SLN STS KAWIN TMT KGB MKG	GAJI POKOK T. ISTRESUAMI T. ANAK G. BRUTO	PENGHASILAN				JUMLAH PENGHASILAN KOTOR	POTONGAN				JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH GAJI LAUK PAUK JUMLAH DIBAYARKAN	KETERANGAN (PEMBAYARAN UANG MUKA GAJI, SISA HUTANG DLL)
				T. STRUKTURAL T. FUNGSIONAL T. UMUM	T. PCN/BERAS T. KOWAN T. SANDUK/OMPEN T. BADINSA	T. PAPUA T. PENCIL T. P. TERLUAR T. TERAMPIL	T. LAINNYA TTP T. PK PENGHASILAN PEMBULATAN		P. BERAS P. PENSIUN P. BPJS P. THT	SEWA RUMAH UTANG PPH Ps 21	PENGEMBALIAN TGR POT LAINNYA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

.....

KUASA PENGURUS ANGGARAN/KEPALA

.....

NRP/NIP

4

12. FORMAT SKPP PENSIUN PRAJURIT TNI

(Nama Satker)	SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (PINDAH)		Nomor :
			Lampiran :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala menerangkan bahwa:			
IDENTITAS PEGAWAI			
Nama Pegawai	:		
NRP	:		
Tempat Lahir	:		
Tanggal Lahir	:		
Golongan / Pangkat	:		
Jabatan	:		
Satker dan Kode Satker	:		
BERDASAR SURAT KEPUTUSAN			
SK Dari	:		
Tanggal SK	:		
Nomor SK	:		
Diberhentikan sebagai Prajurit TNI Terhitung Mulai Tanggal	:		
SAMPAI DENGAN BULAN TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :			
PENGHASILAN		POTONGAN	
Gaji Pokok		Potongan Beras	
Tunjangan Istri / Suami		Iuran Wajib Pegawai	
Tunjangan Anak		PPh Pasal 21	
Tunjangan Umum		Sewa Rumah Dinas	
Tunjangan Beras		Utang Kepada Negara	
Tunjangan Struk/Fung.		TGR	
Tunjangan Kowan		Potongan Lain	
Tunjangan Babinsa			
Tunjangan Lauk Pauk			
Tunjangan Papua			
Tunjangan Pencil			
Tunjangan P. Terluar			
Tunjangan Terampil			
Tunjangan Lainnya		JUMLAH POTONGAN	
Pembulatan		JUMLAH BERSIH	
Tunjangan Pajak Penghasilan			
JUMLAH KOTOR			
PEMBAYARAN LAINNYA			
Gaji 13 Terakhir Tahun			
Dibayarkan Uang Muka Gaji Rp Nomor SP2D Tanggal SP2D			

UTANG - UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan	Akun Penerimaan

ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUGAN DALAM DAFTAR GAJI		
Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir

DISAMPAIKAN KEPADA 1. PT. ASABRI (Persero) Cabang 2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal 3. KPPN sebagai pertinggal	Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala
	Nama NRP/NIP
	Data pegawai telah dinonaktifkan dari database KPPN Kepala Seksi PD/PDMS KPPN
	Nama NIP



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO